



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERMOHONAN IZIN USAHA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 100 /PMK.010/2009
TENTANG PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Kepada Yth.
Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan,
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor tanggal..... tentang
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, bersama ini kami:

Nama : PT/Koperasi*)

Alamat :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha dalam bidang Pembiayaan Infrastruktur. Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. akta pendirian PT/Koperasi *) termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
2. data direksi/pengurus *) dan dewan komisaris/pengawas *), meliputi:
 - a. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor bagi yang berkewarganegaraan asing;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. surat pernyataan:
 - 1) tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi direksi atau pengurus berkewarganegaraan asing.
3. data pemegang saham:
 - a. perorangan, berupa:
 - 1) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor bagi yang berkewarganegaraan asing;
 - 2) daftar riwayat hidup;
 - 3) surat pernyataan:
 - a) tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 100 /PMK.010/2009
TENTANG PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

- 4) surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*);
- b. badan hukum, berupa:
 - 1) akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal;
 - 2) laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan interim terakhir;
 - 3) dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2, huruf a, huruf b, dan huruf c bagi pemegang saham atau anggota dan direksi atau pengurus.
- c. Negara Republik Indonesia, berupa Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur.
- d. organisasi multilateral, berupa Akta Pendirian (*Articles of Agreement*) atau dokumen pendirian sejenis.
4. sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia.
5. rencana kerja untuk 5 (lima) tahun pertama yang paling kurang memuat:
 - a. rencana pembiayaan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud;
 - b. proyeksi arus kas, neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan dimulai sejak Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan kegiatan operasional.
 - c. rencana peningkatan modal disetor.
6. bukti kesiapan operasional, antara lain berupa:
 - a. bukti kepemilikan, penguasaan, atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor;
 - b. contoh perjanjian pembiayaan atau perjanjian lain yang akan digunakan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
7. perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan patungan.
8. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P4MN).

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu,*) kami ucapkan terima kasih.

Direksi/Tanggung
Operasi*)

Tembusan:

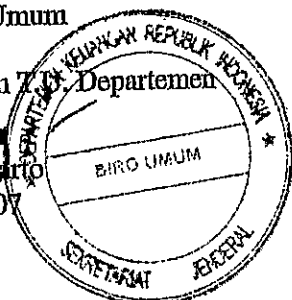
Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan

*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian

Antonijs Subianto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
PT/Koperasi*).....

Kepada Yth.
Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan,
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Menunjuk surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggaltentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kepada PT/Koperasi*)....., dengan ini dilaporkan bahwa kami telah memulai kegiatan usaha pada tanggal

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan fotokopi perjanjian pembiayaan atau perjanjian lain yang telah dilakukan.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi/Pengurus
PT/Koperasi*)
.....

Tembusan:
Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan,

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
Kepala Bagian TU Departemen


Antonius Suharto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 100 /PMK.010/2009
TENTANG PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Kepada Yth.

Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan,
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini dilaporkan bahwa sesuai dengan RUPS/Rapat Anggota tanggal telah dilakukan perubahan anggaran dasar, modal dasar, dan modal disetor*), yaitu:

	Lama (Rp)	Baru (Rp)
Modal dasar
Modal disetor

Komposisi pemegang saham:

Nama Pemegang Saham	Nilai saham (Rp)	Persentase (%)
.....
.....

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan perubahan anggaran dasar yang telah disahkan/ dilaporkan*) kepada instansi berwenang.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu,*) kami ucapkan terima kasih.

Direksi/Pengurus
PT/Koperasi*)

Tembusan:

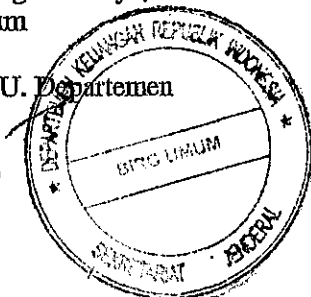
Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan

*) coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Subarto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM/PEMILIK

Kepada Yth.
Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan,
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini dilaporkan bahwa sesuai dengan RUPS tanggal telah dilakukan perubahan modal dasar, modal disetor dan pemegang saham/pemilik, yaitu:

	Lama (Rp)	Baru (Rp)
Modal dasar
Modal disetor

Lama		Baru	
Nama Pemegang Saham	Nilai saham (Rp)	Nama Pemegang Saham	Nilai saham (Rp)
.....
.....

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan:

- perubahan anggaran dasar yang telah disahkan/dilaporkan*) kepada instansi berwenang;
- data pemegang saham:
 - perorangan, berupa:
 - fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - daftar riwayat hidup; dan
 - surat pernyataan:
 - tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
 - tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
 - badan hukum, berupa:
 - akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- berwenang termasuk bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal;
- 2) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan terakhir;
 - 3) bagi pemegang saham badan hukum tersebut:
 - i. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - ii. daftar riwayat hidup; dan
 - iii. surat pernyataan:
 - tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
 - tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- c. Negara Republik Indonesia, berupa Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur.
- d. organisasi multilateral, berupa Akta Pendirian (*Articles of Agreement*) atau dokumen pendirian sejenis.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi/Pengurus
PT/Koperasi*).....

Tembusan:

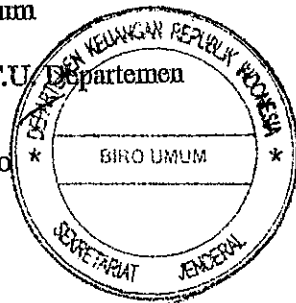
Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan

*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERUBAHAN DIREKSI/PENGURUS DAN
DEWAN KOMISARIS/PENGAWAS

Kepada Yth.

Menteri Keuangan Republik Indonesia

c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan,

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

Dengan ini dilaporkan bahwa sesuai dengan RUPS/Rapat Anggota tanggal telah dilakukan perubahan direksi/pengurus dan/atau dewan komisaris/pengawas, yaitu:

	Lama	Baru
Komisaris Utama/Pengawas
Komisaris/Pengawas
Direktur Utama/Pengurus
Direktur/Pengurus

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan:

Data direksi/pengurus dan/atau dewan komisaris/pengawas meliputi:

1. fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor bagi yang berkewarganegaraan asing;
2. daftar riwayat hidup;
3. surat pernyataan:
 - 1) tidak pernah dihukum karena tindakan pidana kejahatan;
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 3) tidak merangkap jabatan sebagai direksi/pengurus pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur lain bagi direksi/pengurus;
 - 4) tidak merangkap jabatan sebagai komisaris/pengawas pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur lain atau perusahaan yang bergerak dalam proyek Infrastruktur.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

4. fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi direksi atau pengurus berkewarganegaraan asing; dan
5. bukti berpengalaman di bidang jasa keuangan paling kurang 2 (dua) tahun bagi salah satu direksi/pengurus.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu,*) kami mengucapkan terima kasih.

Direksi/Pengurus
PT/Koperasi*)

.....

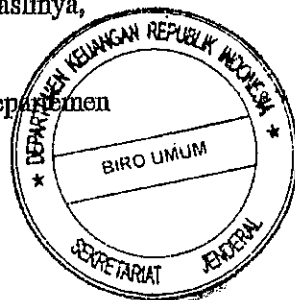
Tembusan:

Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan

*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Subarto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG
PT/Koperasi*).....

Kepada Yth.
Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Bersama ini kami melaporkan pembukaan Kantor Cabang di ... dengan alamat lengkap ...

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami lampirkan:

- a. rencana kerja tahunan kantor cabang;
- b. bukti penguasaan gedung kantor; dan
- c. sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia termasuk nama calon kepala cabang serta jumlah karyawan.

Demikian laporan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi/Pengurus
PT/Koperasi*)

.....

Tembusan:
Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan.

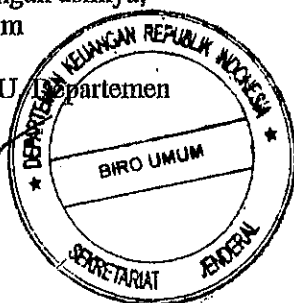
*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PENUTUPAN KANTOR CABANG
PT/Koperasi*)

Kepada Yth.
Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Bersama ini kami melaporkan penutupan Kantor Cabang di dengan alasan

Demikian laporan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu,*) kami mengucapkan terima kasih.

Direksi/Pengurus
PT/Koperasi*)

.....

Tembusan:
Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan.
*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN

ttd.

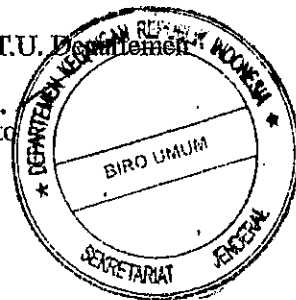
SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR
PT/Koperasi*)

Kepada Yth.
Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Bersama ini kami melaporkan pemindahan alamat kantor dari
ke dengan alasan
Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami lampirkan bukti kesiapan kantor
termasuk sarananya.

Demikian laporan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu,*) kami mengucapkan
terima kasih.

Direksi/Pengurus
PT/Koperasi*)

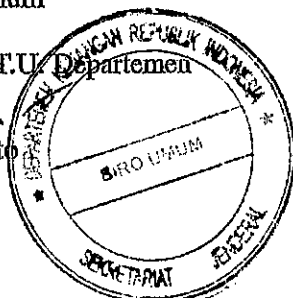
.....

Tembusan:
Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan.
*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 0610041107



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI



LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 100 /PMK.010/2009
 TENTANG PERUSAHAAN
 PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 LAPORAN PERUBAHAN NAMA
 PT/Koperasi*).....

Kepada Yth.
 Menteri Keuangan Republik Indonesia
 c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan,
 Gedung Sumitro Djojohadikusumo
 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
 Jakarta 10710

Bersama ini kami laporkan bahwa sesuai dengan RUPS/Rapat Anggota tanggal ..., nama PT/Koperasi*) ... berubah menjadi PT/ Koperasi*) Perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Keputusan Nomor tanggal

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan:

- a. risalah Rapat Umum Pemegang Saham/Rapat Anggota;
- b. perubahan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang baru.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami mohon kepada Bapak/Ibu*) untuk memberlakukan izin usaha PT/Koperasi*) kepada PT/Koperasi*)

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi/Pengurus
 PT/Koperasi*)

.....

Tembusan:
 Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan
 *) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN
 ttd.
 SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Biro Umum
 u.b.
 Kepala Bagian Tata Departemen
 Antonius Subarto
 NIP 060041107

